

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan kemajuan teknologi, terdapat pergeseran konsep pemerintahan yang lebih bijaksana dan penyelenggaraan yang berdasarkan prinsip *good governance*. Prinsip ini dapat mewujudkan keseimbangan antara beberapa pihak. Seperti apa yang disampaikan Bambang Rudito dalam bukunya (Nopyandri, 2014) menyampaikan Ketika ada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi, maka tata kelola dalam kondisi yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan adalah persyaratan dasar untuk mengembangkan tata kelola yang baik dalam pengaturan apa pun. Pengelolaan aset publik oleh pemerintah harus transparan, efektif, dan efisien, serta harus mampu menjawab tuntutan fundamental keadilan. Bukan hanya pemerintah pusat saja sebagai kekuasaan tertinggi yang melaksanakan konsep pemerintahan yang baik, namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban terhadap hal tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun, menguasai, dan mengurus daerahnya sendiri karena merupakan daerah otonom yang tidak dapat diintervensi atau dibantu oleh pemerintah federal. Sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, maka secara tidak langsung diharapkan pemerintah daerah dapat meneliti dan mengidentifikasi potensi yang paling menjanjikan yang dimiliki daerahnya

masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance yang menjunjung tinggi transparansi, efikasi, dan efisiensi agar warga negara merasa terlibat langsung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan secara realistis yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Otonomi Daerah hanya dapat dilaksanakan secara efisien dan berhasil di bawah kepemimpinan pemerintahan yang stabil dan berwibawa serta dengan kerjasama aparatur pemerintah yang berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik dan mewujudkannya. Kemampuan keuangan pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan PAD lain yang sah.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pendapatan 2017-2020

No.	Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Daerah	1.231.515.123.563	1.331.817.746.450	1.561.698.569.340	1.427.517.034.054
2.	Retribusi Daerah	85.744.858.357	107.791.109.630	113.680.849.539	88.759.174.010
3.	BUMD	28.491.561.139	42.552.117.491	41.241.433.982	53.323.875.693
4.	Lain-lain	446.134.835.615	339.113.129.679	349.712.565.727	377.890.575.908

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Pajak dan Retribusi memberikan dampak yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas, dimana pajak daerah dan retribusi memiliki angka penerimaan yang besar ketimbang dua jenis penerimaan lain. Retribusi memiliki beberapa keunggulan dari pada pungutan jenis pajak, mengapa demikian, karena dalam pelaksanaannya pungutan jenis retribusi dapat ditarik berulang kali sepanjang digunakannya jasa yang diberikan.

Keunggulan lainnya yang dimiliki pungutan jenis ini adalah pungutan yang dilakukan dilapangan adalah sah, berbeda dengan pajak yang tak boleh dilakukan.

Sejalan dengan beberapa keunggulan yang dimiliki pungutan jenis retribusi ini, dapat kita ketahui bahwa retribusi ikut andil dalam pendapatan daerah. Salah satu jenis retribusi yang dilakukan adalah retribusi parkir. Retribusi parkir menjadi pungutan yang ideal bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Semarang. Melalui pungutan jenis retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan secara langsung dapat berperan aktif didalam membantu pembangunan daerah. Namun melalui data yang diperoleh pada kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2016-2020 memperlihatkan bahwa, tak pernah tercapainya target dari penerimaan retribusi parkir Kota Semarang, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Target (%)
1	2	3	4
2016	3.850.000.000	3.012.751.000	78,25%
2017	4.235.000.000	2.529.446.000	59,73%
2018	15.000.000.000	2.441.057.000	16,27%
2019	115.000.000.000	1.474.295.000	1,28%
2020	110.677.000.000	1.037.375.000	1,01 %

Sumber: Dokumen Bidang Pungutan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dijelaskan dalam Pasal 2 PERWAL Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 terkait Besaran Tarif layanan Parkir pada TJU (Tepi Jalan Umum), yang menjelaskan tentang struktur dan besaran biaya parkir insidental adalah dua kali besaran tarif parkir, biaya parkir bulanan. Kendaraan roda tiga dan dua tersedia dengan harga dua ribu rupiah, dan kendaraan roda empat dengan harga tiga ribu

rupiah, kendaraan bermotor roda enam tersedia dengan harga lima belas ribu rupiah. Peraturan baru tersebut mencakup perubahan tarif pengguna yang harus dibayar oleh pelanggan parkir, serta kenaikan tarif yang berlaku. Selain itu, target pendapatan untuk 2018 telah ditingkatkan dari tahun sebelumnya 2016 dan 2017. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang baru mulai berlaku pada 2018, jumlah uang redistribusi parkir yang direalisasikan pada 2018 lebih kecil dari jumlah yang direalisasikan pada tahun 2017.

Salah satu contoh titik parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang adalah wilayah Taman Indonesia Kaya. Titik parkir tepi jalan umum wilayah Taman Indonesia menjadi salah satu titik yang memiliki pendapatan parkir yang tinggi dibandingkan dengan titik parkir disekitarnya. Perbandingan pendapatan parkir di beberapa titik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Pendapatan Di berbagai titik parkir Kota Semarang Di Sekitar Taman Indonesia Kaya (Pendapatan per bulan pada tahun 2020)

No	Nama Jalan (Titik Parkir)	Pendapatan/bulan	Pendapatan/tahun
1.	Simpang 5	1.500.000	18.000.000
2.	Indraprasta	1.030.000	12.360.000
3.	Taman Indonesia Kaya	2.100.000	25.200.000
4.	Erlangga Barat	900.000	10.800.000
5.	Kusumawardani	1.500.000	18.000.000
6.	Pleburan	3.000.000	36.000.000
7.	Taman Pekunden	450.000	5.400.000
8.	Pahlawan	300.000	3.600.000
9.	Tri Lomba Juang	500.000	6.000.000

Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Semarang (Data Di Olah oleh Penulis)

Dari 9 titik parkir yang diambil penulis berdasarkan titik parkir disekitar wilayah Taman Indonesia Kaya, maka dapat dilihat bahwa Taman Indonesia Kaya memiliki pendapatan yang cukup tinggi kurun waktu setahun. Pengaruh tingginya pendapatan tersebut dapat disebabkan karena Taman Indonesia Kaya merupakan

salah satu tempat yang berada di pusat Kota Semarang dan menjadi salah satu pusat kuliner khas yaitu tahu gimbal. Letak yang strategis tersebut kemudian menjadi nilai tambah bagi Taman Indonesia Kaya.

Pendapatan Taman Indonesia Kaya masih dibawah Pleburan yang mana jalan tersebut memiliki banyak titik parkir. Taman Indonesia Kaya memiliki tiga titik parkir. dua titik berada pada kawasan Pedagang Kaki Lima dan satu titik berada pada kawasan samping kantor gubernur Kota Semarang. Pendapatan parkir tepi jalan umum di wilayah Taman Indonesia Kaya mengalami masalah dalam satu tahun terakhir. Masalah tersebut muncul pada tahun 2020, dimana dalam kurun waktu satu tahun tersebut pendapatan parkir tepi jalan umum hanya masuk sekitar 3 bulan pertama pada tahun 2020.

Tabel 1. 4 Pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum Taman Indonesia Kaya Tahun 2019-2020

Tahun	Target / tahun	Realisasi	Presentase realisasi terhadap target (%)
1	2	3	4
2018	25.200.000	25.200.000	100%
2019	25.200.000	25.200.000	100%
2020	25.200.000	4.200.000	18%

Sumber : Dishub Kota Semarang

Melihat data diatas, pendapatan parkir tepi jalan umum di wilayah Taman Indonesia Kaya mengalami penurunan yang cukup besar. Terdapat 3 titik parkir resmi di wilayah tersebut dengan rincian pendapatan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 1. 5 Rincian Target Pendapatan Titik Parkir Taman Indonesia Kaya Per Bulan

Titik	Target Pendapatan/bulan
PKL 1 (Timur Taman Indonesia Kaya)	Rp. 600.000
PKL 2 (Timur Taman Indonesia Kaya)	Rp. 600.000
Samping Gubernur	Rp. 900.000

Sumber : Seksi Perijinan Dishub Kota Semarang

Jika dibandingkan antara rincian target penerimaan setiap titik dengan pendapatan parkir tepi jalan umum wilayah Taman Indonesia Kaya pada tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa penerimaan masuk hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja atau dalam kurun waktu 1 tahun pembayaran selalu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara juru parkir dan bidang pungutan.

Melihat retribusi parkir Taman Indonesia Kaya yang mengalami masalah dimana target pendapatan per tahun menunjukkan angka dua puluh lima juta dua ratus, dan pada tahun 2019 berhasil dicapai, namun pada tahun 2020 dengan target yang sama namun realisasi yang didapatkan hanya empat jutaan saja. Dimana presentasi realisasi target dan realisasinya sebesar 18%. Hal ini tentu menjadi perhatian dan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan skripsi ini digunakan untuk mencari tahu terkait dengan tata kelola perparkiran Kota Semarang yang dilihat dari perspektif *Good Governance* yang mana studi penelitian berada diwilayah Taman Indonesia Kaya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana tata kelola parkir Kota Semarang studi wilayah Taman Indonesia Kaya yang dilihat menggunakan teori *Good Governance* ?
- 1.2.2 Bagaimana transparansi dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya ?
- 1.2.3 Bagaimana akuntabilitas dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya ?
- 1.2.4 Bagaimana partisipasi dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui tata kelola parkir kota Semarang studi wilayah Taman Indonesia Kaya yang dilihat menggunakan teori *good governance*.
- 1.3.2 Menjelaskan dan menganalisis transparansi dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya.
- 1.3.3 Menjelaskan dan menganalisis akuntabilitasnya dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya.
- 1.3.4 Menjelaskan dan menganalisis partisipasinya dalam tata kelola parkir di Taman Indonesia Kaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian tersebut peneliti berharap dapat memberikan perspektif positif bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, selain bermanfaat sebagai pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang bagaimana parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Diharapkan juga dapat memperkuat teori-teori mengenai hal-hal lain yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian tersebut peneliti berharap dapat memberikan sumber data dan informasi bagi penulis dan pembaca. Temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi civitas akademika FISIP Universitas Diponegoro, dan temuan penelitian ini akan memberikan opsi tambahan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam hal mengentaskan permasalahan pengelolaan parkir.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya dirancang untuk melengkapi penelitian saat ini dengan memberikan informasi tambahan dan berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian saat ini dan penelitian lainnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan sebagai sumber informasi referensi penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan tinjauan berbagai penelitian sebelumnya, telah ditentukan bahwa tidak ada penelitian

lain dengan judul yang sama dengan penelitian penulis yang telah dilakukan. Berbagai penelitian sejenis lainnya, seperti yang tercakup dalam tabel berikut, dapat dijadikan referensi dan bahan penelitian oleh penulis. Ini termasuk studi berikut:

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ismet Sulila (Sulila, 2014)	“Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo”	Implementasi Kebijakan Publik	Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo dan Kendala apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo adapun dengan ditetapkannya Perda ini diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan daerah perlu memperbaiki segala kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
2.	Hardiansyah Hutabarat, R Slamet Santoso	“Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang”	Evaluasi Kebijakan	Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang sejauh ini masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan sehingga untuk menyikapi realitas ini tentunya dibutuhkan upaya ekstra agar mampu mencapai keberhasilan tersebut. Namun

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				hasil yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa belum banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menggenjot pendapatan daerah dari retribusi parkir, ini dikarenakan beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat kondisional, tidak permanen dan komprehensif, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, dan upaya-upaya lain yang sudah dicanangkan belum dapat terwujud.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, kesamaan yang didapati adalah terkait dengan pelayanan parkir yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian tersebut. Ditambah lagi kedua masalahnya terdapat masalah pada proses pengelolaan. Sedangkan hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah sudut pandang dari penelitian tersebut dan mengaitkan dengan perspektif *good governance*. Penulis memilih melihat pada sudut pandang kelembagaan pada proses pengelolaannya dikarenakan jika dilihat dari masalah yang muncul dilapangan dan beberapa temuan yang ada, kemudian mengindikasikan sebuah kebocoran pada proses tata kelola perparkiran Kota Semarang. Pembeda kedua terletak pada penulis akan menganalisis melalui kacamata *good governance*, karena dengan prinsip *good*

governance merupakan prinsip terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini.

1.6 Tinjauan Teori

1.6.1 Tata Kelola Pemerintahan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan mengarahkan, membimbing, atau membentuk urusan publik untuk mewujudkan cita-cita ini dalam kehidupan sehari-hari berada di bawah definisi pemerintahan yang luas (Laloma & Plangitan, 2018). Upaya untuk mengatur urusan publik dapat digambarkan sebagai pemerintahan. Dikatakan pula oleh (Basuki, 2019) dalam artikelnya bahwa *governance* adalah suatu teknik yang digunakan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi tantangan. Definisi lain dari tata kelola adalah penggunaan organisasi, struktur otoritas, dan bahkan kolaborasi untuk mendistribusikan sumber daya data dan mengkoordinasikan atau mengontrol tindakan dalam masyarakat atau ekonomi.

1.6.2 Good Governance

Sebelum melangkah lebih jauh dengan pembahasan *good governance*, perlu diingat bahwa *governance* tidak sama dengan *government* dalam pengertiannya. Banyak orang percaya bahwa kedua ungkapan tersebut memiliki arti yang sama, yaitu ketika *good governance* terwujud, *good governance* juga akan terwujud, dan ini benar. (Utomo, 2006) menjelaskan bahwa pemerintah adalah pemerintahan yang bergantung pada otoritas yang

menunjukkan manajemen dengan tingkat kekuasaan yang paling besar, dan perbedaannya terletak pada rincian politik yang monolitik dan terpusat. Akibatnya, pemerintah, baik lokal maupun nasional, menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas semua administrasi publik dan upaya pembangunan. Pemerintah, di sisi lain, didasarkan pada kompatibilitas atau harmoni yang ada antara berbagai komponen, organisasi, atau kekuatan yang ada di dalam pemerintahan negara tertentu. Di dalam pemerintahan, terjadi sinergi antara tiga pelaku yang ada, yaitu pemerintah itu sendiri atau masyarakat, masyarakat atau *civil society* atau masyarakat sipil, dan pihak swasta atau swasta yang semuanya bekerja sama. Sepanjang pertunjukan, setiap pemain menyadari tujuan, fungsi, dan arahnya sendiri secara rinci.

Sebaliknya, pemerintahan diarahkan pada pengakuan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata urusan pemerintah, dengan penekanan lebih besar ditempatkan pada mekanisme, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dan warga negara untuk mengelola sumber daya dan mencari serta merumuskan pemecahan masalah di muka. dari isu-isu publik yang mendesak. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah diposisikan sebagai salah satu pemain yang tidak selalu menjadi penentu situasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan mungkin dapat memainkan peran dominan dalam administrasi organisasi ini.

Penerapan *good governance* memerlukan beberapa aspek pendukung sebagai karakteristik utama dari tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik. Seperti apa yang disampaikan oleh beberapa ahli:

Tabel 1. 7 Karakteristik *Good Governance* Menurut Ahli

No	Karakteristik <i>Good Governance</i> Menurut Ahli	
	1	2
1.	Meuthia Ganie Rochman (Ilham Arisaputra, 2013)	1. Akuntabilitas publik 2. <i>Value for money</i> 3. Transparansi 4. Efektivitas manajemen sumber daya manusia
2.	Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (BPKP)	1. Partisipasi 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Kemandirian 5. Pertanggung jawaban
3.	Agus Dwiyanto (Agus Dwiyanto, 2005)	1. Pemberian ruang kepada lembaga non pemerintah 2. Efektivitas dan efisiensi 3. Transparansi 4. Akuntabilitas
4.	<i>United Nation Development Program</i> (UNDP) (Moeljono, 2005)	1. Partisipasi 2. Penegakan hukum 3. Transparansi 4. Responsif 5. Equity 6. Efektivitas dan efisiensi 7. Akuntabilitas
5.	Bappenas (Abarca, 2003)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi

Dari karakteristik para ahli yang tertulis pada tabel diatas, diketahui jika transparansi, akuntabilitas, partisipasi merupakan beberapa prinsip pokok dari terwujudnya *good governance*. Bappenas merangkum dan menempatkan ketiga prinsip tersebut menjadi prinsip pokok karena ketiga hal tersebut menjadi prasyarat minimal dari terwujudnya *good governance*. Pengertian terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menurut Bappenas , sebagai berikut ;

- a. Transparansi dalam kebijakan publik, keterbukaan mengacu pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk

memahami proses persiapan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai melalui implementasi suatu kebijakan publik. Segala urusan pemerintahan dalam bentuk kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah, harus tersedia bagi publik untuk ditinjau.

- b. Akuntabilitas merupakan kewajiban entitas publik terhadap rakyatnya didefinisikan sebagai berikut: Akuntansi organisasi publik dapat berupa laporan kinerja organisasi selama periode waktu tertentu, yang dapat mencakup kinerja keuangan dan non keuangan, serta kinerja selama periode waktu tertentu. jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Partisipasi atau yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Agar penyelenggara pemerintahan lebih memahami warganya, cara berpikir dan hidup mereka, masalah yang mereka hadapi, cara atau solusi yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, dan sebagainya, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk keberhasilan mereka. Dimungkinkan kurangnya keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menyebabkan kebijakan publik yang diambil tidak mampu mengakomodir berbagai ambisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan.

Ciri dan cita-cita yang melekat pada *good governance* harus dapat dicapai pada setiap tingkatan struktur pemerintahan saat ini agar dapat

berjalan efektif. Meskipun pemerintah harus mengambil keputusan strategis untuk memulai pengembangan praktik tata kelola yang baik, namun luasnya cakupan masalah yang dihadapi, kompleksitas masalah yang ada, serta terbatasnya sumber daya dan kapasitas pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mereformasi tata kelola. memerlukan penerapan pendekatan bertahap yang dilakukan sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sepanjang perubahan tersebut secara konsisten mengarah pada perbaikan praktik tata kelola. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mewujudkan cita-cita terkait dengan *good governance*, menurut (Agus Dwiyanto, 2005), merupakan salah satu alternatif strategis untuk mendorong *good governance* di Indonesia.

1.7 Definisi Konseptual

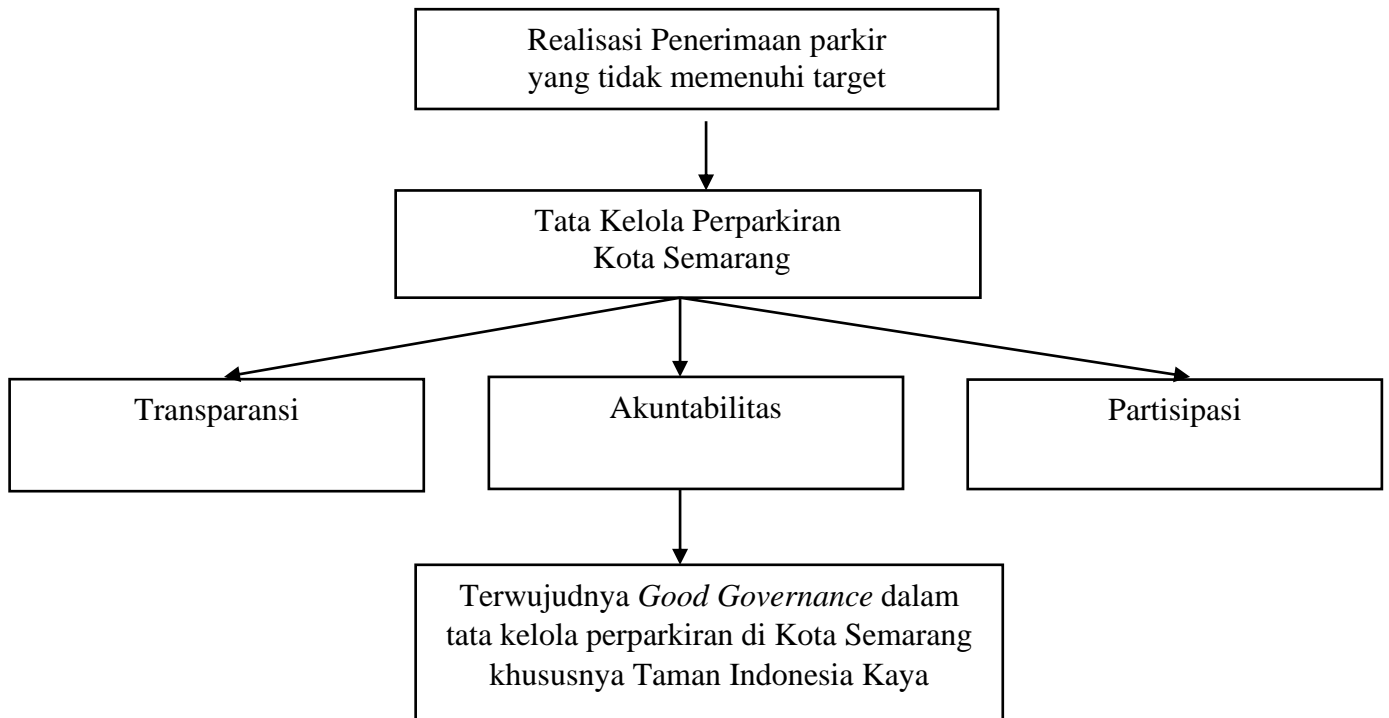
1.7.1 Tata Kelola

Dapat dikatakan bahwa tata kelola merupakan upaya pengendalian terhadap tindakan yang berkaitan dengan urusan publik, dalam pengoprasionalisasinya tata kelola parkir merupakan upaya pengendalian terhadap parkir melalui kebijakan yang mengikat dan dapat menjadikan urusan perparkiran berjalan sesuai dengan apa yang menjadi benang merahnya. Tata kelola parkir ini berkaitan dengan mekanisme perparkiran.

1.7.2 Good Governance

Good governance dapat terwujud apabila lebih diarahkan pada pemahaman jika kekuasaan bukan lagi semata-mata urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada mekanisme, praktik, dan prosedur bagi pemerintah dan warga negara untuk mengelola sumber daya dan mencari serta merumuskan pemecahan masalah bagi masalah public, sebaliknya ketika *governance* lebih menekankan pada pemahaman jika kekuasaan tidak semata-mata urusan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan adalah tiga sifat yang paling penting untuk dipertimbangkan. Penerapan konsep-konsep *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan harus dicermati agar dapat menjadi model keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola parkir harus memasukkan elemen-elemen ini agar berhasil.

1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Metode Penelitian

Prosedur ilmiah menyiratkan bahwa kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, seperti rasionalitas, empirisme, dan sistematisasi. Kewajaran mengacu pada fakta bahwa operasi penelitian dilakukan dengan cara yang logis, sehingga dapat dipahami dan dapat diakses oleh akal dan intelek manusia. Penelitian berbasis bukti menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan dapat diperhatikan oleh indera manusia, memungkinkan individu lain untuk memeriksa dan mempelajari metode yang digunakan. Sugyono (2008) mendefinisikan penelitian sistematis sebagai prosedur yang mengikuti urutan tahapan yang logis. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa penelitian sistematis didefinisikan sebagai berikut:

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh tujuan penelitian, dan meliputi metode kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengelolaan parkir di kota Semarang dilakukan dari sudut pandang tata kelola kota yang baik. Pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan tujuan tertentu.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang tepatnya di Dinas yang menangani masalah parkir yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang dan beberapa ruas jalan yang menjadi lahan parkir sebagai data pendukung.

1.9.3 Subyek Penelitian

Menurut (Suharsimi, 2006), subjek penelitian adalah seseorang atau lebih yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini guna menentukan pihak mana saja yang memberikan informasi dalam penelitian ini, dan siapa yang diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi. Berikut ini adalah beberapa informan yang dipilih untuk penelitian ini:

- a. Drs. Joko Santosa, M.Si (Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang)

- b. Hendri Apriyanto, S.E (Kepala Seksi Pendataan Dinas Perhubungan Kota Semarang)
- c. Rusmanto, S.E (Kepala Seksi Pungutan Dinas Perhubungan Kota Semarang)
- d. Gama Ekawira Arga Nugraha, S.Kom (Kepala Seksi Penataan dan Perijinan)
- e. Petugas Parkir Taman Indonesia Kaya
- f. Pengguna Layanan Parkir Taman Indonesia Kaya

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

1.9.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi ini diperoleh untuk mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan objek yang mana tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya melalui studi literatur.

1.9.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang

diteliti. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan.

1.9.4.3 Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang memfokuskan pada pengamatan dan pengindraan. Menyampaikan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.

1.9.5 Sumber Data

1.9.5.1 Data Primer

Sumber yang didapatkan secara langsung, bukan melalui perantara, seperti database. Untuk tujuan memperoleh informasi penting untuk penelitian ini, sejumlah sukarelawan penelitian diwawancarai dalam pengaturan yang terkontrol.

1.9.5.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer, melalui studi literasi, dokumen-dokumen, dan data pendukung lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga didukung dari buku-buku tentang tata pemerintahan yang baik dan topik terkait lainnya.

1.9.6 Analisis dan interpretasi data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, Menurut (Creswel, 2002) analisis data dilakukan secara mendalam melalui gambar atau teks yang disajikan dengan beberapa tahap berikut:

1.9.6.1 Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Mempersiapkan dan memilah data mentah untuk dirubah menjadi data yang berbeda sesuai dengan sumber informasi.

1.9.6.2 Membaca data

Meluangkan waktu untuk membaca seluruh kumpulan data. Tahap ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua informasi yang tersedia untuk mengembangkan makna yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan makna secara keseluruhan.

1.9.6.3 Coding hasil wawancara

Dalam penelitian ini coding dilakukan untuk menandai hasil wawancara yang berkaitan. Setelah analisis isi tekstual dari temuan wawancara, mengklasifikasikan kalimat ke dalam kategori dan memberi label kategori tersebut. Prosedur pengkodean digunakan dalam penelitian ini untuk mengkategorikan dan melabeli hasil wawancara terkait.

1.9.6.4 Coding Deskripsi

Buat tema atau kategori dalam jumlah minimal menggunakan pengkodean agar semuanya tetap sederhana.